



AKSI PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM: MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

Dr. Rachman Kurniawan

Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan

Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada “**Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Cirebon**” - UCLG ASPAC
Selasa, 10 Mei 2022



OUTLINE

- 1. Pengantar**
- 2. Pelaksanaan SDG 13**
- 3. Praktik Baik**





1. PENGANTAR



TPB/SDGs adalah VISI KITA BERSAMA

MDG 2000 - 2015



SDGs 2015 - 2030



Lebih Komprehensif → Melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal

Memperluas Sumber Pendanaan (Pemerintah, Swasta, dan Sumber Lain)

Menekankan pada hak asasi manusia

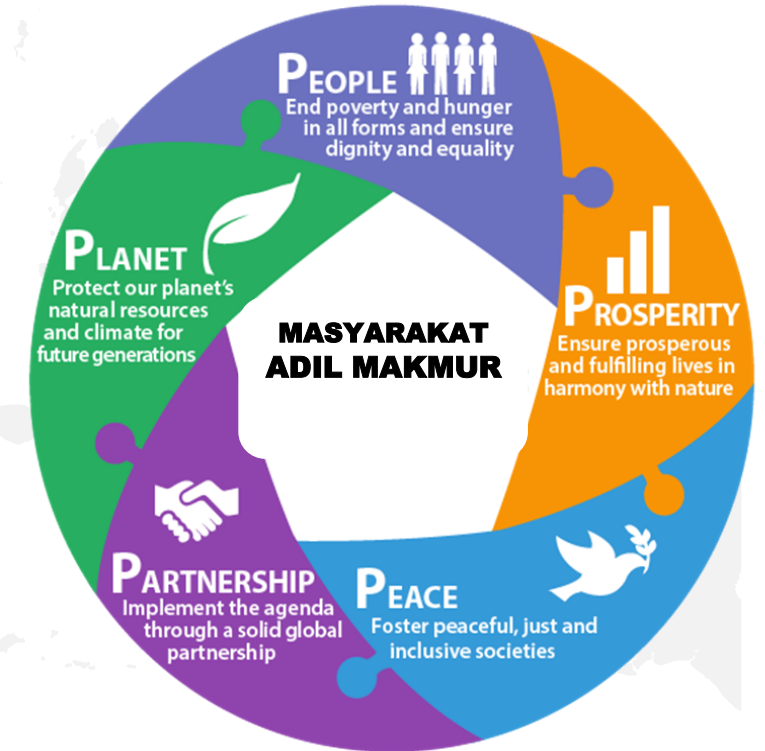
Inklusif → *no one left behind*

Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan: Pemerintah; OMS & Media; Filantropi & Bisnis; serta Pakar & Akademisi

"Zero Goals" → Menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator

Memiliki Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*)

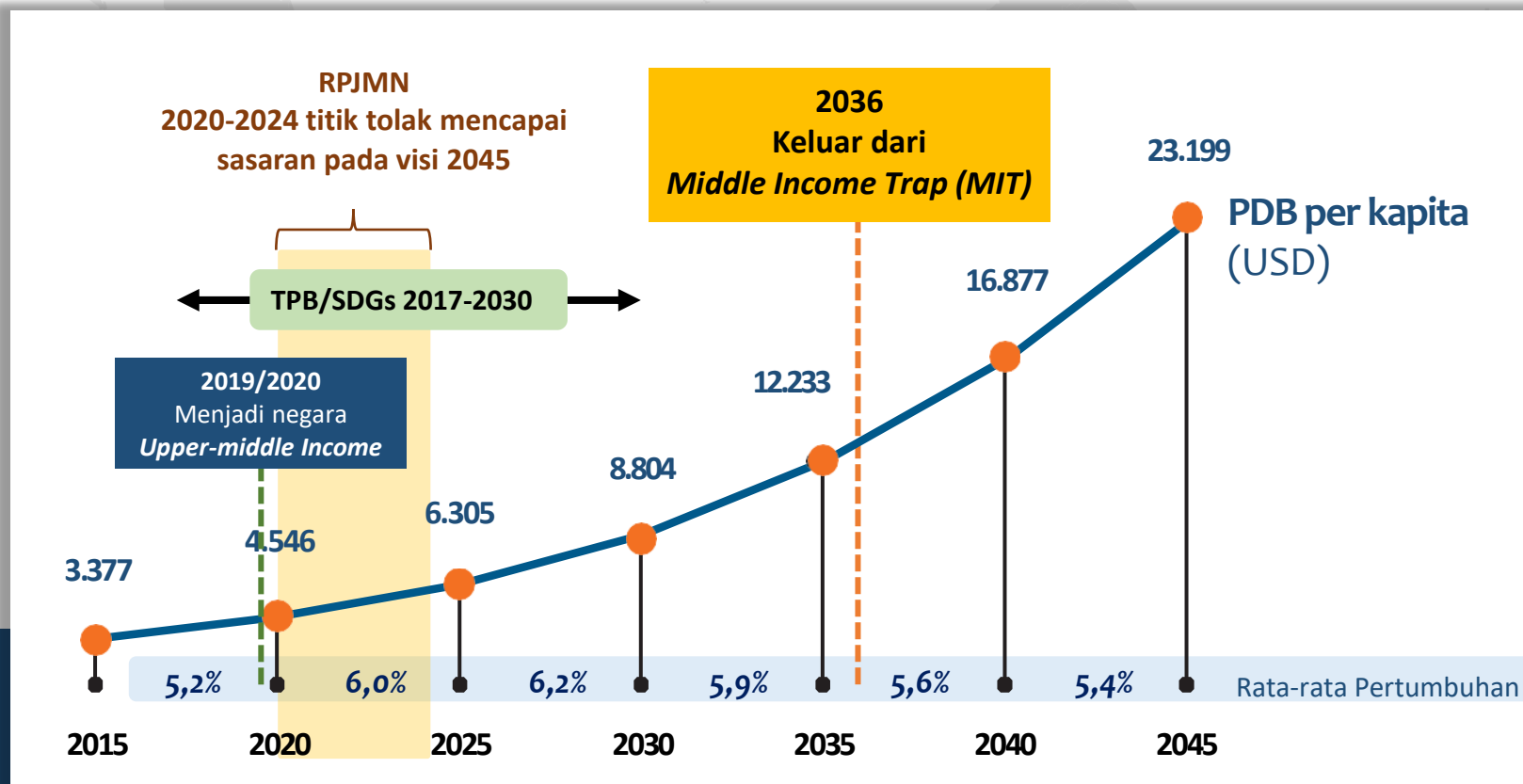
Sustainable Development for
OUR Future Generation



SDGs menawarkan kerangka pelaksanaan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan serta memastikan Tidak Ada Satu pun Yang Tertinggal (*No one Left behind*)

Visi Indonesia 2045 adalah Menuju Negara Maju

- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030** memberikan landasan kokoh untuk menuju **Indonesia Maju**
- **Transformasi Ekonomi** telah dimulai dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs



Rata-rata pertumbuhan
2015-2045:

PDB Riil **5,7%**

PDB Riil / Kapita **5,0%**

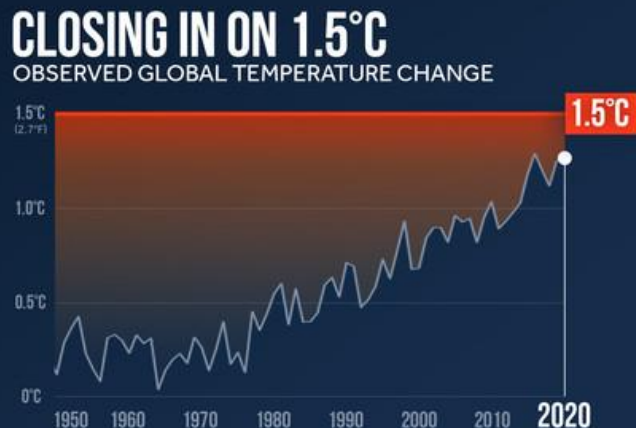
Tahun 2045:

Peranan Kawasan
Timur Indonesia
(KTI) **25%**

Negara Maju dan
PDB terbesar **Ke-5**
(USD 7,4 triliun)

Pembangunan Berkelanjutan Menghadapi Tantangan Akibat **Perubahan Iklim**

Perubahan suhu rata-rata global di atas rata-rata pra-industri sejak 1950



Suhu permukaan global 1,09°C lebih tinggi dalam sepuluh tahun antara 2011–2020 dibandingkan 1850–1900.



Pada tahun 2019 konsentrasi CO2 di atmosfer merupakan yang tertinggi sejak 2 juta tahun terakhir.

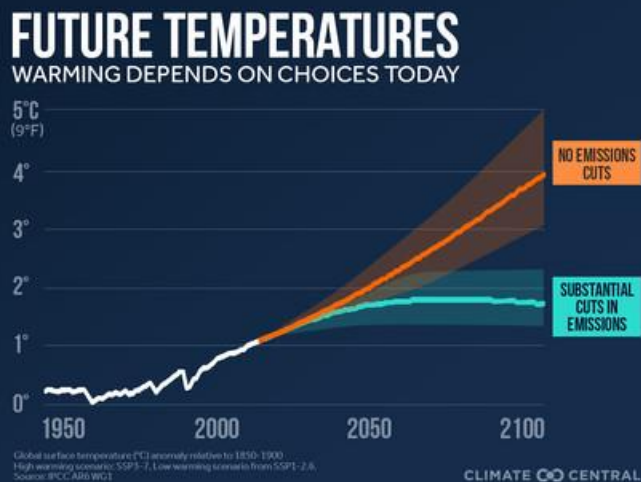


Tingkat kenaikan permukaan laut baru-baru ini nyaris tiga kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 1901–1971.



Pengaruh manusia sangat mungkin (90%) menjadi alasan utama mencairnya gletser secara global sejak 1990-an dan penurunan jumlah es di Laut Arktik.

Suhu permukaan bumi akan bergantung pada tindakan dan pilihan kita saat ini



Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memperingatkan kemungkinan pemanasan bumi hingga 1,5 derajat dalam satu atau dua dekade mendatang: **Code red for humanity**



5,8 juta km² wilayah perairan Indonesia **berbahaya** bagi kapal nelayan <10GT



1.800 km garis pantai masuk dalam kategori **sangat rentan**



Produksi beras akan **menurun** di beberapa wilayah



Peningkatan suhu
0,45-0,75°C



Perubahan curah hujan
± 2,5 mm/hari



Kenaikan muka laut
0,8-1,2 cm/tahun



Gelombang ekstrem meningkat
>1,5 m



Lebih dari **100 bencana** terjadi selama 6 bulan pertama pandemi COVID-19



Lebih dari **50 juta** orang terdampak



Lebih dari **10 bencana** berbeda yang mempengaruhi lebih dari 250.000 orang

99%

masyarakat terdampak akibat bencana cuaca dan iklim yang ekstrem

Data BNPB: Selama 2020, 99% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi



Banjir di Kalsel



badai cyclone di Seroja



Banjir di Jakarta



Badai siklon di Seroja memicu banjir besar dan longsor yang menimbulkan setidaknya 165 korban jiwa



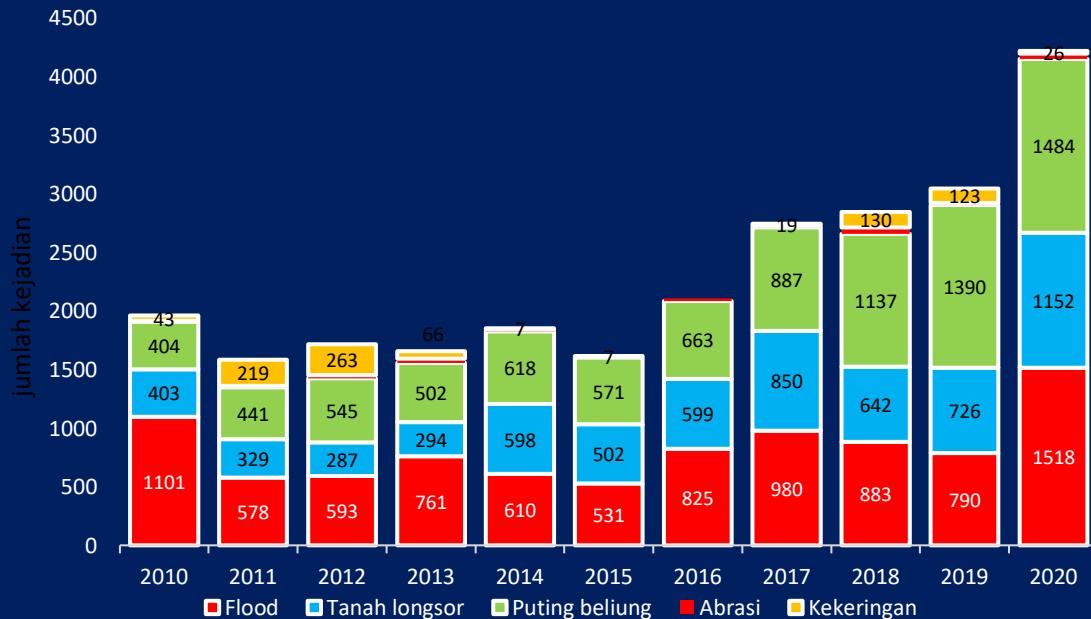
Kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8 triliun per tahunnya (Kementerian Keuangan)



Adapun jumlah kematian akibat bencana hidro meteorologi selama 10 tahun terakhir mencapai **1,183 orang**

Dampak dan Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim di Indonesia

Intensitas dari Bencana Hidrometeorologi di Indonesia (2010-2020)

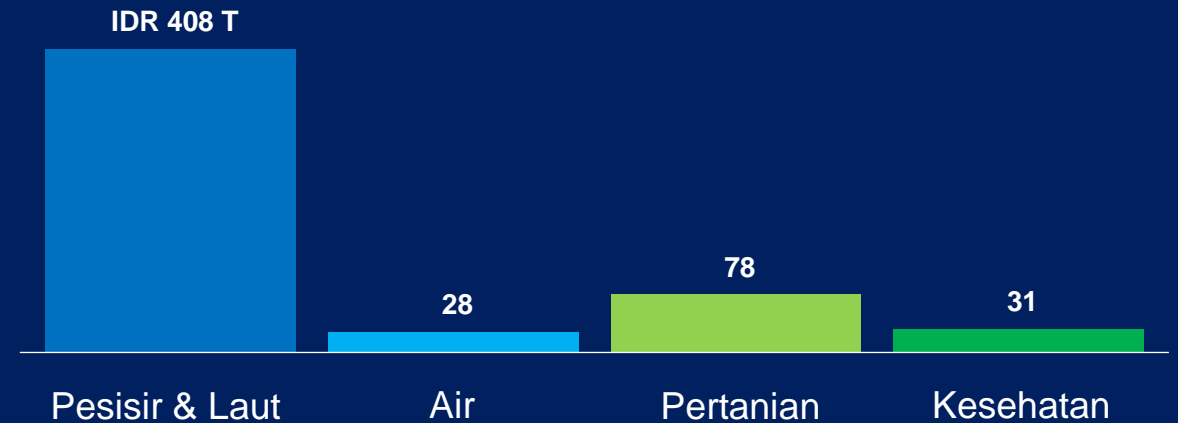


Sumber : BNPB

Bencana hidrometeorologi di Indonesia pada 2020 mencapai 4.842 (meningkat 2,4% dibanding tahun 2010). Jenis bencana didominasi oleh banjir, longsor dan tornado.

Potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024)

Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga Rp. 544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim, jika tidak ada intervensi kebijakan (*business as usual*)



Sumber: Bappenas

Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim antara lain: Kecelakaan Kapal dan Genangan Pantai, Penurunan Ketersediaan Air, Penurunan Produksi Beras, dan Peningkatan Kasus Demam Berdarah

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia menggunakan valuasi ekonomi (potensi kerugian ekonomi) sebagai alat ukur untuk 4 sektor prioritas (perairan, perikanan laut, kesehatan, dan pertanian). Kebijakan ketahanan iklim sebagai salah satu prioritas dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi dari Rp. 115 triliun (tanpa intervensi) menjadi Rp. 57 triliun (dengan intervensi) pada tahun 2024.



2. PELAKSANAAN SDG 13



Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

Integrasi SDGs

Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

PENGARUSTAMAAN TPB/SDGs KE DALAM NAWACITA PEMBANGUNAN JILID II (7 AGENDA PEMBANGUNAN) RPJMN 2020 – 2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

4. PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK PEMERATAAN



Melaksanakan TPB/SDGs berarti
Melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional

3. KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

1 TANPA KEMISKINAN
10 BERKURANGNYA KESEJANGAN

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

5. INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

6. STABILITAS POLHUKHANKAM & TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

7. LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

14 EKOSISTEM LAUTAN

15 EKOSISTEM DARATAN

1. SDM BERKUALITAS & BERDAYA SAING

1 TANPA KEMISKINAN

2 TANPA KELAPARAN

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

5 KESETARAAN GENDER

Potensi Pelaksanaan RAD SDGs di Daerah



PENGINTEGRASIAN SDGs DALAM PEMBANGUNAN DAERAH




**Pengintegrasian SDGs
dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah**

Permendagri
No. 7 Tahun 2018
"Pembuatan
& Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD"

**INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN"**

**KLHS
RPJMD**

Ps. 15 (a)

Ps. 15 (b)

RAD TPB

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH**

Pasal 5 Permendagri
no. 86/2017
Rumusan penyusunan
rencana pembangunan
daerah : Transparan
dan berwawasan
lingkungan dan
berkelanjutan.

**Perpres 59/2017 ttg
Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan**

**Perpres 59/2017 psl. 15: Gubernur
Bersama Bupati di wilayahnya
menyusun RAD TPB lima
tahunan.**

Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana



13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



TARGET 13-1



TARGET 13-2



TARGET 13-3



TARGET 13-A



UNFCCC

Kebijakan Pembangunan



Integrasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) ke dalam RPJMN 2020–2024



Integrasi kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)




Penguatan Sistem Ketahanan Bencana

MITIGASI & ADAPTASI

Kondisi yang Diharapkan

Mencapai Visi Indonesia Maju 2045

- Indonesia keluar dari “*middle income trap*” sebelum Indonesia emas 2045.



Limit temperature increase to 1.5°C





UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE UK 2021

IN PARTNERSHIP WITH ITALY

SENDAI FRAMEWORK

FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030

Mendukung Agenda Global

Melindungi Wilayah dan Kelompok Rentan

Selaras dengan target: RAN SDGs

- RAD SDGs
- Rencana aksi terkait **mitigasi** dan adaptasi **perubahan iklim**

SDGs Adalah Kerangka Kerja Bersama

Memastikan No One Left Behind

Target-target SDGs yang ambisius hanya dapat dicapai melalui:

1 KEMITRAAN seluruh pemangku kepentingan



Pemerintah dan Parlemen



Filantropi dan Pelaku Usaha



Akademisi dan Pakar



Ormas dan Media

Kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan **keterlibatan filantropi/pelaku usaha**, CSO dan akademisi dalam berbagai sektor dan bidang usaha.

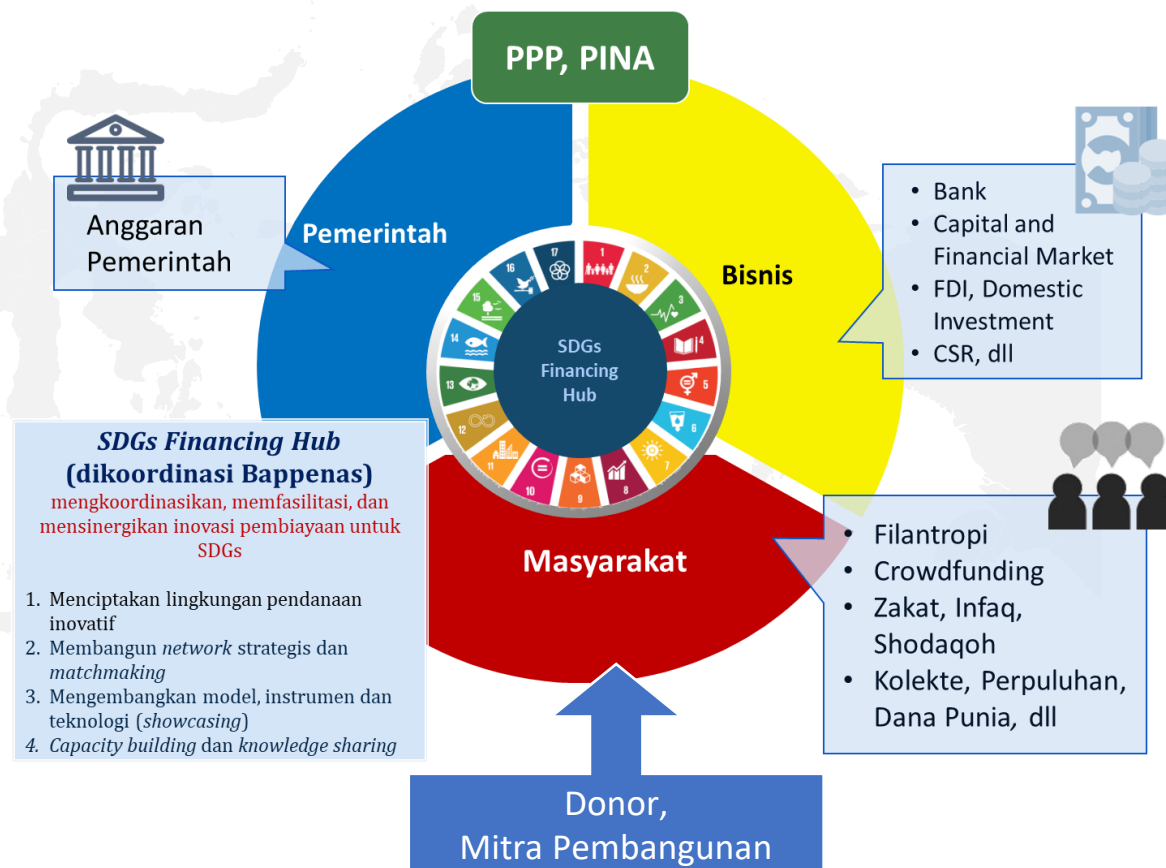
2 UPAYA PELOKALAN SDGs

Pelokalan SDGs adalah proses mengadaptasi, mengimplementasi, serta memantau SDGs di tingkat lokal:

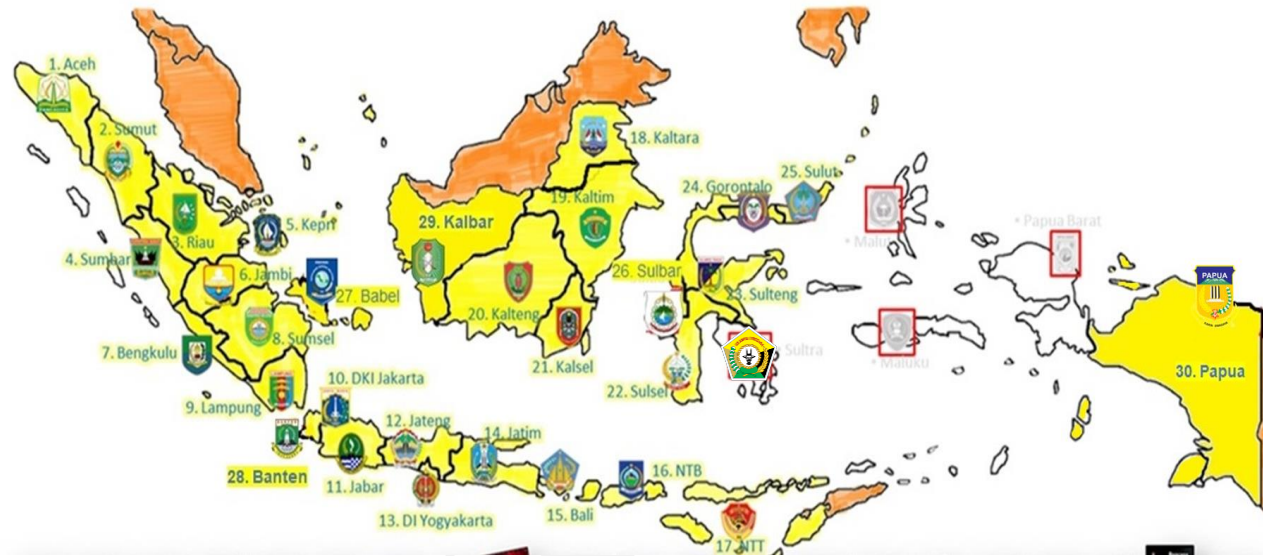
- Tersedianya kerangka kerja SDGs nasional untuk kebijakan pembangunan daerah.
- Dukungan pemerintah daerah dan desa dalam pencapaian SDGs nasional dengan kegiatan-kegiatan *bottom up*.
- Internalisasi prinsip-prinsip SDGs dalam semua bisnis proses.

3 UPAYA INOVATIF & TRANSFORMATIF

Inovasi pengelolaan, kelembagaan, pendanaan, regulasi, teknologi, dll



Upaya Pelokalan SDGs & Dukungan Peran dari Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS PADJADJARAN	UNIVERSITAS JEMBER	UNIVERSITAS BENGKULU	UNIVERSITAS MATARAM	IPB UNIVERSITY	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	UNIVERSITAS HASANUDDIN	LPPi	UNIVERSITAS INDONESIA	UNIVERSITAS GAJAH MADA
UNIVERSITAS LAMPUNG	UNIVERSITAS RIAU	UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	UNIVERSITAS KALTARA	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS ANDALAS	UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	UNIVERSITAS KALTARA	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	UNIVERSITAS DIPONEGORO	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di 31 Provinsi yang ditetapkan melalui Pergub dan memuat Matriks Program/Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota

Sudah terbentuk 27 SDGs Center/Network/Hub di berbagai Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat Nasional dan Daerah

Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan & Komitmen Penurunan Emisi

Indonesia's commitment to achieve the SDGs

1 TANPA KEMISKINAN	2 TANPA KELAPARAN	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	5 KESETARAAN GENDER	6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	10 BERKURANGNYA KESEKIANJARAN	11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
13 PEMANGGIAN PERUBAHAN IKLIM	14 EKOSISTEM LAUTAN	15 EKOSISTEM DARATAN	16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAAN YANG TANGGUH	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Bappenas menjadikan **Goals 13 (Perubahan Iklim)** sebagai **basis utama** untuk mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan (**Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Lingkungan**).

Pembangunan Rendah Karbon & Ketahanan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim sebagai agenda prioritas nasional yang telah memiliki target, lokasi dan sektor yang jelas di dalam RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024



PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PRIORITAS NASIONAL 6.3
Pembangunan Rendah Karbon

-  Pemulihan energi berkelanjutan
-  Pemulihan Lahan Berkelanjutan
-  Pengelolaan Limbah
-  Pengembangan industri hijau
-  Blue Carbon

Untuk pertama kalinya, Penurunan Emisi GRK juga ditetapkan sebagai salah satu Kerangka Ekonomi Makro

					
Pertumbuhan ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini (Index)	Tingkat Pengangguran (%)	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	Penurunan Emisi GRK (%)
5,7-6,0	6,5-7,0	0,360-0,374	4,0-4,6	75,54	27,3%

Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dengan Indikator Makro



*Indikator Makro Ekonomi Pembangunan 2020-2024

**Indikator Ketahanan Iklim Nasional

Tantangan Kolaborasi dan Upaya Melokalkan SDGs Terutama dalam Peningkatan Kapasitas Aksi Iklim

Pemahaman konsep, kerangka dan prinsip SDGs belum merata



Sehingga pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan belum holistik termasuk perwujudan di tingkat masyarakat. Pemahaman holistic bahwa penanganan perubahan iklim terkait berbagai sektor pembangunan.

Pelibatan Semua Pihak



Untuk memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan *no one left behind* belum maksimal

Sinergi program kegiatan pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah dan NSA



Sinergi yang tidak berdampak pada efektivitas dan daya ungkit program untuk pencapaian SDGs termasuk SDG13

Pengukuran capaian SDGs di tingkat subnasional (provinsi dan kab/kota)



Keterbatasan data dan penerjemahan indikator di tingkat daerah bahkan sampai desa, termasuk pentingnya keterbandingan data capaian antartingkatan atas 17 *goals* SDGs termasuk SDG13



3. PRAKTEK BAIK



Praktik Terbaik: Implementasi Program Pembangunan Rendah Karbon

Rehabilitasi mangrove bekas lahan *tailing* di Belitung

Penerapan *System Rice of Intensification* di NTT



Economic Benefit

Rp 50-65 jt

Tambahan pendapatan Kelompok pengelola ekowisata

Rp 22,2 M

Sumber pendanaan yang dapat ditarik dari investasi awal senilai Rp. 2 M

Rp 1 juta

Tambahan pendapatan Per keluarga/bulan

200%

Peningkatan produktivitas padi



Environmental Benefit

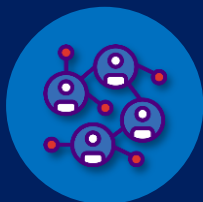
50 ha

Rehabilitasi hutan mangrove di lahan bekas penambangan

Potensi penurunan Emisi GRK dari rehabilitasi area bekas tambang menjadi hutan mangrove

Potensi penurunan Emisi GRK dari penggunaan pupuk organik

Meningkatkan ketahanan pangan dan air



Social Benefit

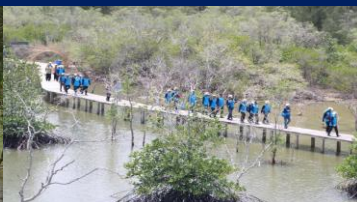
164 orang

menerima manfaat langsung dan sebagian merupakan bekas penambang timah lokal yang beralih kepada **green job**

Membangun Kolaborasi & Sinergi antara K/L, pemda dan universitas

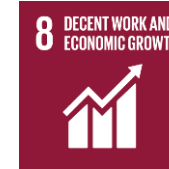
Meningkatkan Kapasitas Petani dalam menerapkan *smart farming*

Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar



Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

meningkatkan **tambahan pendapatan** sekaligus **menjaga hutan** dan **menurunkan emisi GRK**



Manfaat
Ekonomi

Rp 1 Juta

Per bulan tambahan pendapatan bagi masyarakat/keluarga

6 ton/ha/tahun

Meningkatkan produksi padi dari 2 ton/ha/tahun

Manfaat
Lingkungan

807.400

ton CO₂eq/tahun potensi penurunan emisi (*above ground*)

400 ha

menurunkan degradasi hutan dan menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar

Manfaat
Sosial

Berhentinya budaya pertanian dengan membakar lahan

Meningkatnya kapasitas HKm mengenai sistem pengelolaan dan pengawasan blok penyangga

Rehabilitasi Hulu DAS Ciliwung - #0kmciliwung



menciptakan **green job**, peningkatan tambahan pendapatan sekaligus menurunkan emisi GRK

Manfaat Ekonomi

Rp15-30Jt

Per 3 bulan tambahan pendapatan bagi penjualan kopi dan madu

Tambahan pendapatan dari berbagai kegiatan kelola hutan desa dan manajemen usaha ekonomi

Manfaat Lingkungan

100 ha

Lahan terdegradasi telah direhabilitasi

Potensi **Penurunan Emisi GRK** dari rehabilitasi hulu DAS Ciliwung

Manfaat Sosial

Meningkatkan kapasitas kelompok LMDH untuk mengelola kawasan DAS Ciliwung Hulu

Contoh praktik baik yang mendukung perlindungan ketahanan pangan

Ketahanan Pangan & Air Menuju Masyarakat Tangguh Iklim



Lokasi: Kabupaten Rote Ndao, NTT



Capaian Kegiatan



Kapasitas Pemerintah Daerah meningkat

Tersusunnya dokumen sebagai berikut:

- Kajian Kerentanan Kabupaten Rote Ndao.
- Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rote Ndao 2018.
- Rencana Aksi Desa di 3 desa (Boni, Oelasin, dan Bolatena).



Meningkatnya kapasitas masyarakat di 3 Desa (Boni, Oleasin, dan Bolatena)

- Kolaborasi antara masyarakat dan Pemdes dalam pemanfaatan EBT (Pembangunan Infrastruktur air untuk air bersih dan pertanian berbasis tenaga surya dan 1 paket listrik panel surya).
- Pertanian pekarangan yang dilakukan oleh 40 kepala keluarga.
- Terbentuknya 3 kelompok pengolahan hasil pertanian.
- Pengembangan demplot budidaya hortikultura dan hidroponik seluas 100m² dengan tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim (hemat air dan rendah emisi).

EKONOMI

Kenaikan Pendapatan

AIR

Efisiensi air

PANGAN

Climate Smart Agriculture

ENERGI

Kemandirian energi dengan memanfaatkan EBT



TERIMA KASIH



Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDGs

Website : <http://sdgs.bappenas.go.id>
Instagram : @sdgs_indonesia
Facebook : SDGsIndonesia
Twitter : @SDGs_Indonesia
Email : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id